

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan I Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>Sasaran Program 1.</b> <b>Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD</b>					
1.1	Indikator 1.1 Presentase Penyelesaian Initial Memorandum dalam Proses Akses OECD	Persentase	100%	50%	50%	100%* 50%**
<b>II</b>	<b>Sasaran Program 2.</b> <b>Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</b>					
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,60 Triliun	Rp 465,2 Triliun	Rp 465,2 Triliun	100%* 24,4%**
<b>III</b>	<b>Sasaran Program 3.</b> <b>Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</b>					
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi	Persentase	82%	20%	20%	100%* 24,4%**

<b>IV</b>	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas</b>					
<b>4.1</b>	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100%* 33,3%**
<b>V</b>	<b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas</b>	Indeks	3 dari 4	0 dari 4	0 dari 4	0%
<b>5.1</b>	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					
<b>VI</b>	<b>Sasaran Program 6. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas</b>	Persentase	85%	21%	21%	100%* 24,7%**
<b>6.1</b>	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					
Note: - *= % capaian triwulan - ** = % capaian tahunan						

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1

### Sasaran Program 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan (*roadmap*).

Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses aksesori dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

***Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD***

**Latar Belakang**

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD dalam mengawal proses awal aksesori Indonesia keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampaiannya kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan aksesori.

Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan proses aksesori, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Aksesori Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Akses dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampaian kepada Sekretariat OECD.

Formula perhitungan kinerja dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah IM yang disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kdrja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 50% ditentukan berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menyampaikan Dokumen Initial Memorandum secara lengkap kepada Sekretariat OECD pada Triwulan II tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 50% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persen	50%	50%	50 % (Memuaskan)

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD

merupakan *direct cascading* dari indikator Pemenuhan pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD. IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan sampai dengan laporan ini disusun, presentase penampaian Dkumen IM kepada Sekretariat OECD telah mencapai 50%.

Sekretariat Tim Nasional OECD telah menyampaikan dokumen IM tahap pertama untuk 4 bidang, yaitu *Statistics, Trade, Export Credits* dan *Small and Medium Enterprises*, serta dokumen IM tahap ke-2 sebanyak 8 bidang, yaitu *Public Governance, Financial Markets, Insurance and Private pensions, Fiscal Affairs, Corporate Governance, Investment, Competition*, dan *Anti-Corruption*. Dokumen ini akan menjadi dasar pembahasan pada tahap akses lanjutan, yaitu tinjauan teknis yang melibatkan komite-komite OECD dengan Kementerian/ Lembaga pengampu bidang.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan I adalah sebagai berikut:

<b>1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW I</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pertemuan dengan Deputi Secretary-general OECD	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan dengan Deputi Secretary-general OECD pada 8 Januari 2025.
2.	Pertemuan dengan Deputy Director for Legal Affairs and the OECD Accession Coordinator	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pertemuan dengan Deputy Director for Legal Affairs and the OECD Accession Coordinator pada 21 Januari 2025
3.	Permintaan Penyampaian Perkembangan Penyusunan Dokumen Initial	Terlaksana	Dalam rangka mengawal pencapaian target penyampaian IM kepada Sekretariat OECD, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

	Memorandum OECD		Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengirimkan surat kepada Kementerian/Lembaga yang belum menyampaikan informasi mengenai perkembangan penyusunan dokumen IM pada tanggal 23 Januari.
4.	Rapat Koordinasi Terbatas terkait Perkembangan Akses OECD Indonesia	Terlaksana	Rapat Koordinasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.
5.	Rapat Koordinasi Penyusunan Initial Memorandum	Terlaksana	Dalam rangka mengakselerasi penyusunan IM dengan rencana submisi tahap ke-4, Sekretariat Nasional OECD menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan initial memorandum pada 14 maret 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perubahan Keppres 17/2024 tanggal 5 Februari 2025
2. Penyampaian Kompilasi Masukan terhadap Rancangan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD tanggal 28 Februari 2025
3. Rapat Teknis Pembahasan Perubahan Keppres 17/2024 tanggal 5 Maret 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Initial Memorandum dan pertemuan-pertemuan lainnya secara virtual dan memanfaatkan ruang rapat di kantor. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp67.832.000.

Hasil Efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di TW II-IV.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) pada K/L Anggota Bidang Tim Nasional OECD yang menyebabkan penyesuaian keterlibatan dan keanggotaan pada Keppres Nomor 17 Tahun 2024 dan Kepmenko Nomor 232 Tahun 2024

Adanya Instrumen OECD yang belum memiliki penanggung jawab untuk pelaksanaan asesmen dan penyusunan dokumen IM karena instrumen tersebut tidak secara jelas dicantumkan pada Peta jalan Akses OECD Indonesia.

## **2**

### **Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Nilai Realisasi PMA dan PMDN**

#### **Latar Belakang**

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

Formula pengukuran:

Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target triwulan I sebesar Rp 100%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi sebesar Rp 465,2 Triliun atau mencapai 24,4% dari target Tahun 2025 sebesar Rp 1.905,6 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,6 Triliun	Rp 465,2 Triliun	24,4%

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp 465,2 triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 230,4 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 234,8 triliun.



Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. DKI Jakarta sebesar Rp 69,8 triliun,
2. Jawa Barat sebesar Rp 68,5 triliun,
3. Jawa Timur sebesar Rp 36,0 triliun,
4. Sulawesi Tengah sebesar Rp 32,7 triliun, dan
5. Banten sebesar Rp 31,1 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan I 2025 didorong oleh lima subsektor utama, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp 67,3 triliun,
2. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 66,5 triliun,
3. Pertambangan sebesar Rp 48,6 triliun,
4. Jasa Lainnya sebesar Rp 41,0 triliun, dan
5. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 37,5 triliun.

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Singapura sebesar US\$ 4,6 miliar; b) Hongkong sebesar US\$ 2,2 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar US\$ 1,8 miliar; d) Malaysia sebesar US\$ 1,0 miliar; dan e) Jepang sebesar US\$ 1,0 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor-sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW I</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Rapat koordinasi evaluasi capaian nilai hilirisasi komoditas strategis TW I	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Komoditas Kelapa khususnya Kelapa Non Standar menjadi <i>Crude Coconut Oil</i> (CCO) sebagai bahan baku Bioavtur pada tanggal 16 Januari 2025, 10 Februari 2025 dan 12 Februari 2025 di Jakarta.</li> <li>2. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan paket kebijakan</li> </ol>

			<p>energi bersih pada 14 Januari 2025 dan mendapat masukan dari K/L terkait, serta memetakan pola kerja penyusunan kebijakan energi bersih.</p> <p>3. Telah dilaksanakan diskusi terkait Energi Bersih dengan Tim Prospera pada 5 Februari 2025 dan 20 Maret 2025.</p> <p>4. Rapat Koordinasi Capaian Pelaksanaan <i>Roadmap</i> Komoditas Kelautan, Perikanan, Kelapa Sawit, dan Kelapa pada tanggal 3 Februari 2025 dan 5 Maret 2025 di Jakarta.</p> <p>5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM).</p>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pada triwulan I 2025, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan monitoring pengisian rencana aksi Business Ready Indonesia (B-Ready) dan melakukan reuiu atas rencana aksi yang telah disusun agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan poin B-Ready pada penilaian tahun berikutnya. Monitoring pelaksanaan survei B-Ready merupakan upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia agar investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
2. Membangun *prototype for a Generative AI-based investment assistant* untuk membantu penyediaan informasi dan komunikasi dengan calon investor. Pembangunan prototype merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi dan komunikasi dengan calon investor. Asisten berbasis AI yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan calon investor yang ingin berusaha di Indonesia berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penanaman Modal.

3. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi bekerja sama dengan Prospera melakukan kajian kebijakan energi bersih untuk investasi. Beberapa rapat koordinasi telah dilaksanakan sepanjang triwulan I 2025 sebagaimana berikut: a) Rapat pembahasan paket kebijakan energi bersih pada 14 Januari 2025 dan mendapat masukan dari K/L terkait, serta memetakan pola kerja penyusunan kebijakan energi bersih; dan b) Diskusi terkait Energi Bersih dengan Tim Prospera pada 5 Februari 2025 dan 20 Maret 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa evaluasi Perpres 10 Tahun 2021 dan Perpres 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUMPM). Pada dasarnya Perpres BUMPM memuat pengaturan bidang usaha dalam penanaman modal atau Daftar Negatif Investasi (DNI). Konsep DNI di Perpres BUMPM tercermin dari adanya pengaturan mengenai Daftar Bidang Usaha Tertutup, Daftar Bidang Usaha Dialokasikan dan Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi, dan Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu. Dalam Perpres ini, pemerintah telah mencoba untuk lebih memberikan relaksasi atas bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanam modal asing. Relaksasi DNI yang ada di Perpres BUMPM ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya jumlah bidang usaha dengan pembatasan yang hanya berjumlah 152 bidang usaha, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bidang usaha pada perpres sebelumnya yaitu 515 bidang usaha. Namun demikian, evaluasi Perpres BUMPM terus berjalan, dalam prosesnya ditemukan beberapa pengaturan pembatasan bidang usaha yang harus disesuaikan kembali sehingga diperlukan revisi Perpres BUMPM dengan tetap berprinsip pada relaksasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 163.912.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya serta pelaksanaan urgensi perjalanan dinas luar negeri pimpinan.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Struktur organisasi yang baru terbentuk pada akhir Desember 2024 sehingga unit kerja masih dalam tahap pemetaan dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
2. Efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terbatas, seperti rapat secara online.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yakni dengan:

1. Melaksanakan pemetaan secara detail khususnya stakeholder yang menangani hilirisasi komoditas strategis.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder secara rutin.

### 3

#### **Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi

##### **Latar Belakang**

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun

perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 177,3 Miliar (catatan: Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 sebesar USD 147,7 Miliar, dihitung secara proporsional)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

### 3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 sebesar USD 24,22 Milyar).

Sehingga realisasi IKU Efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

$$\text{Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional} = 80\% \times \frac{(\text{Realisasi } \Sigma \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target } \Sigma \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \Sigma \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target } \Sigma \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \Sigma \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target } \Sigma \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}$$

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Tahun 2025. Adapun target triwulan I sebesar N/A.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 24,4% dari target Tahun 2025 sebesar 82% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	Persen	82%	20%	24,4%

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Hingga triwulan I, jumlah komitmen yang telah terealisasi sebanyak 6 dari target 41 komitmen sebagai berikut:

1. Penandatanganan MoU terkait Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8 dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Pelaksanaan Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang.
3. Penandatanganan Lol PLTA Kayan.
4. Penandatanganan Lol RI-Vietnam on Capacity Building Cooperation in the Field of Engineering and Digital Economy.
5. Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGII) RI-Rusia.
6. Board Meeting Prospera I Tahun 2025.

Adapun untuk nilai perdagangan dan nilai investasi, realisasi triwulan I didorong oleh tingginya aktivitas ekspor dan impor dengan negara mitra. Nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra telah mencapai USD 57,16 miliar dari target USD 177,3 miliar. Sedangkan nilai investasi telah mencapai USD 10,29 miliar dari target USD 32,3 miliar.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional melalui jumlah komitmen, nilai perdagangan dan investasi pada triwulan II tahun 2025 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<b>1.2 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW I</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan penandatanganan MoU terkait pengembangan SDM Cybersecurity RI-Australia antara Kemenko Perekonomian, RMIT Australia, Infinite Learning (Nongsa Digital

			<p>Park) dan Innov8 pada tanggal 12 Februari 2025.</p> <p>2. Telah dilaksanakan pertemuan The 3rd Public-Dialogue Track (PPDT) 1.5 pada tanggal 28 Februari 2025.</p> <p>3. Telah dilaksanakan penandatanganan Lol PLTA Kayan Indonesia-Jepang pada tanggal 28 Februari 2025.</p> <p>4. Telah dilaksanakan penandatanganan Lol Kerja Sama Pengembangan Kapasitas di Bidang Teknik dan Ekonomi Digital antara Menko Perekonomian RI dengan Menteri Perindustrian Vietnam pada tanggal 10 Maret 2025.</p> <p>5. Telah dilaksanakan Pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia dan menyepakati berbagai kerja sama perdagangan, investasi, dan industri RI-Rusia yang tercantum dalam Protocol WGTII ke-6 RI-Rusia pada tanggal 11-12 Maret 2025.</p> <p>6. Telah dilaksanakan Board Meeting Prospera I dalam rangka mengevaluasi hasil kegiatan Prospera periode sebelumnya serta membahas rencangan Prospera 2.0 pada tanggal 13 Maret 2025.</p> <p>7. Telah dilaksanakan pertemuan HLTF-EI ke-47 pada tanggal 24-25 Februari 2025.</p>
2.	Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan		



	pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan I		
3.	Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan I		

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan dengan negara mitra dan K/L terkait untuk membahas persiapan pertemuan PPDT RI-Jepang ke-3 dan finalisasi Lol PLTA Kayan.
2. Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan dengan negara mitra dan K/L terkait untuk membahas finalisasi Protokol WGTII ke-6 RI-Rusia.
3. Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan untuk persiapan SKB RI-Rusia.
4. Telah dilaksanakan pertemuan Working Group AEC ke-11 pada tanggal 18-19 Januari 2025 untuk penyelesaian pembahasan strategic measure dan penyederhanaan daftar key outcome indicators.
5. Telah dilaksanakan pertemuan Working Group AEC ke-12 pada tanggal 22-23 Februari 2025 untuk penyelesaian pembahasan strategic measure, pembahasan perkembangan penyusunan beberapa dokumen antara lain quick wins dan konsolidasi list of activities.
6. Telah dilaksanakan pertemuan Working Group AEC ke-13 pada tanggal 13 Maret 2025 untuk pembahasan quick wins dan consolidated list of activities, pembahasan rencana sosialisasi AEC strategic plan 2026-2030.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa terselesaikannya Lol PLTA Kayan Indonesia-Jepang dan terselesaikannya MoU terkait pengembangan SDM Cybersecurity RI-Australia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting serta melakukan pertemuan di dalam kantor ehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 163.912.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. Fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis.

## 4

### Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ***Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi***

#### **Latar Belakang**

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
  - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
  - b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
  - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
  - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
  - b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
  - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
3. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
  - a. Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil revidi Sekretariat Tim Nasional OECD
  - b. Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
  - a. Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)
  - b. Perkembangan ekonomi global dan domestik
  - c. Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal business yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputy). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting).

#### **Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

#### **Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD1 \times SKP\ AD2 \times SKP\ AD3 \times SKP\ AD4 \times SKP\ AD5}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025. Adapun target triwulan I sebesar 1 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 24,8 (1 dari 4) atau mencapai 33,3% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	33,3%

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari nilai efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan seluruh Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebagai berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{24,3 \times 20 \times 31,7 \times 20 \times 25} = 24,8$$

Nilai efektivitas 24,8 masuk dalam kategori 1 dari 4, di mana nilainya masih di bawah dari 70. Hal tersebut dikarenakan realisasi nilai efektivitas tersebut bersifat proses dan akumulasi dari triwulan I-IV.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra

Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Adapun kegiatan yang telah tercapai, antara lain:

1. Penyelesaian kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun kesepakatan kerja sama ekonomi internasional, antara lain:
  - Kesepakatan melalui MoU terkait Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8 dan Kemenko Perekonomian.
  - Kesepakatan melalui Lol between Indonesia-Vietnam on Capacity Building Cooperation in Field of Engineering and Digital Economy oleh Menko Perekonomian RI dan Menteri Perindustrian Vietnam.
  - Kesepakatan Lol PLTA Kayan.
2. Kesepakatan di forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian.
  - Kesepakatan pada Forum Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang yang menghasilkan Joint Media Statement PPDT 1.5 RI-Jepang
  - Kesepakatan pada Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGII) RI-Rusia yang menghasilkan Protocol WGII ke-6 RI-Rusia.
  - Kesepakatan pada Forum Board Meeting Prospera I Tahun 2025 yang menghasilkan Minutes of Meeting.

Selain capaian di atas, terdapat capaian Kerja sama ekonomi lainnya yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan I yakni:

1. Kesepakatan dalam Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan dan Industri India dalam Kunjungan Kerja Menko di sela-sela Kunjungan Presiden ke India ada tanggal 23 s.d 27 Januari 2025. Pertemuan membahas berbagai isu strategis termasuk upaya penyelesaian permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi.
2. Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Investasi UAE, Menteri Ekonomi UAE, dan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE dalam Kunjungan Kerja Menko di sela-sela Forum World Government Summit (WGS 2025) di Dubai pada tanggal 11 s.d 12 Februari 2025.
3. Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) dan Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang dalam Kunjungan Kerja Menko disela-sela Acara Penerimaan Penghargaan dan Bilateral di Jepang pada tanggal 8-9 Mei 2025.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian indeks efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada triwulan II tahun 2025 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperkuat sinergi program, menyelesaikan permasalahan yang menghambat, dan menentukan tindak lanjut antar K/L.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyelesaian komitmen kerja sama ekonomi internasional	Terlaksana	<p>Telah dilakukan penandatanganan Letter of Intent on on Capacity Building Cooperation in the Field of Engineering and Digital Economy antara Indonesia dan Vietnam sebagai salah satu deliverables pada kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Viet Nam ke Indonesia tanggal 10 Maret 2025. Penandatanganan dilakukan oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. Lol ini mencakup pengembangan talenta teknologi, promosi inisiatif digital seperti teknologi informasi dan komunikasi (ICT), industri semikonduktor, serta kendaraan listrik.</p> <p>Telah dilaksanakan penandatanganan MoU dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang cybersecurity (cybersecurity) antara Kemenko Perekonomian dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), PT Kinema Systrans Multimedia (Infinite Learning-Nongsa Digital Park), PT Innoveight Technofarm Indonesia (Innov8). Penandatanganan komitmen antara Indonesia-Australia ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025.</p> <p>Telah dilaksanakan penandatanganan Protocol Pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia dalam rangkaian kegiatan SKB RI-Rusia pada tanggal 15 April 2025.</p>

			Telah disepakati Joint Media Statement PPDT 1.5 Indonesia-Jepang sebagai hasil dari Pertemuan the 3rd PPDT 1.5 RI-Jepang
2.	Melakukan identifikasi kendala dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan Lol on Training Exchange Cooperation in the Field of Engineering and Digital Economy pada tanggal 26 Februari 2025. Rapat telah mengundang K/L teknis terkait lainnya yang berkaitan dengan isu ini yang menjadi salah satu deliverables pada Kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Viet Nam ke Indonesia.</p> <p>Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum Kemenko Ekon dan Dit Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemlu terkait masukan untuk finalisasi konsep Lol terkait. Peningkatan Kapasitas di Bidang Teknik dan Ekonomi Digital melalui surat tanggal 5 Maret 2025 serta telah menerima surat balasan dari Dit. HPE Kemlu dan Biro HO Kemenko Ekon pada tanggal 6 Maret 2025.</p> <p>Telah dilakukan pendampingan Menko Perekonomian pada Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam dalam rangka menghadiri High Level Business Dialogue bertajuk "Vietnam and Indonesia: A Partnership for Progress and Prosperity dalam rangka memperingati 70 Tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam pada tanggal 10 Maret 2025.</p> <p>Telah dilaksanakan Pertemuan terkait Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan MoU on Cybersecurity dengan Partner (RMIT, Infinite Learning, Innov8) pada tanggal 10 Februari 2025. Rapat Persiapan juga dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025</p>



			<p>dengan internal Kemenko Ekon dalam rangka mempersiapkan hal-hal teknis lainnya untuk kelancaran acara.</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro HO Kemenko Perekonomian terkait reviu terhadap konsep MoU kerja sama terkait Keamanan Siber antara Indonesia dan Australia melalui ND tanggal 7 Februari 2025 dan telah menerima tanggapan pada tanggal 11 Februari 2025.</p> <p>Telah dilaksanakan pengidentifikasian isu-isu kerja sama dalam bidang perdagangan, industri, dan investasi antara Indonesia dan Rusia untuk dimasukkan dalam Protocol WGTII RI-Rusia. Surat permintaan masukan telah disampaikan kepada KL terkait pada 17 Januari 2025 dan masukan K/L diterima pada akhir Januari 2025. Selanjutnya, isu-isu yang telah dihimpun dimasukkan ke dalam draft Protocol WGTII RI-Rusia, yang kemudian kembali dimintakan masukan kepada K/L pada 3 Februari 2025. Draft yang telah disempurnakan tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada pihak Rusia pada tanggal 19 Februari 2025.</p> <p>Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia telah dilaksanakan pada 27 Februari 2025 dengan mengundang K/L terkait lainnya.</p> <p>Telah dilakukan rangkaian rapat koordinasi dan pertemuan koordinasi dengan pihak Rusia dalam rangka membahas Protocol Pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia selama bulan Maret 2025.</p> <p>Telah diselenggarakannya pertemuan ke-6 WGTII RI-Rusia pada tanggal 11-12 Maret 2025.</p>
--	--	--	--

			<p>. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan The 3rd Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 Indonesia-Jepang pada tanggal 24 Januari 2025 dalam rangka mengidentifikasi isu-isu Kerja sama yang akan diangkat dalam forum serta tanggal 27 Februari 2025 sebagai persiapan akhir substansi.</p> <p>. Telah dilaksanakan jaring masukan kepada K/L terkait melalui penyampaian surat permohonan masukan untuk topik pertemuan PPDT melalui surat tanggal 18 Februari 2025.</p> <p>. Telah diselenggarakan Pertemuan the 3rd PPDT 1.5 RI-Jepang pada tanggal 28 Februari 2025</p> <p>. Telah dilakukan pengidentifikasian isu-isu terkait perkembangan program Prospera Indonesia-Australia dengan Kedubes Australia pada tanggal 17 Januari 2025.</p> <p>. Telah dilakukan pertemuan Brief Meeting Prospera bersama Kedubes Australia, Tim Prospera dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam rangka persiapan Board Meeting Prospera pada tanggal 10 Maret 2025.</p> <p>. Telah dilaksanakan Pertemuan Board Meeting Prospera pada tanggal 13 Maret 2025.</p> <p>. Telah menghadiri pertemuan antara Kemenko Perekonomian dengan Kedutaan Besar RRT yang membahas terkait keberlanjutan executing agency yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Marves pada tanggal 16 Januari 2025.</p> <p>. Telah dilakukan penunjukan focal point Kemenko Perekonomian dalam Contact Group for Economic and Trade Issues (CGETI) pada tanggal 3 Maret 2025.</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>. Telah menghadiri rapat koordinasi perkembangan partisipasi Indonesia dalam pertemuan BRICS di bawah Ketetuaan Brasil 2025 pada tanggal 10 Maret 2025.</li> <li>. Telah menghadiri pertemuan BRICS Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD) pada tanggal 18 Maret 2025.</li> <li>. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tim Pendukung Sekretariat The Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC (Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) pada tanggal 9 Januari 2025.</li> <li>. Telah menghadiri rapat koordinasi CPOPC pada tanggal 21 Februari 2025.</li> <li>. Telah menghadiri Discussion on CPOPC's Q2 Proposed Budget pada tanggal 25 Maret 2025.</li> <li>. Telah menghadiri Discussion on Work Plan and Budget 2025 pada tanggal 25 Maret 2025.</li> <li>. Telah menghadiri pertemuan ke-14 ATIGA Upgrade TNC pada tanggal 17-21 Maret 2025. Salah satu isu yang perlu ditindaklanjuti adalah remanufacture goods (RG) melalui identifikasi kemampuan industri RG Indonesia di pasar ASEAN.</li> <li>. Telah menghadiri pertemuan ke-7 AITIGA-JC dan rangkaian pertemuan terkait pada tanggal 11-15 Februari 2025. Negosiasi teks telah mencapai 15,7% dari total paragraf yang diusulkan dan 10% dari total artikel telah selesai.</li> <li>. Telah dilaksanakan rapat persiapan pertemuan HLTF-EI ke-47 pada tanggal 20 Februari 2025 dan pertemuan HLTF-EI pada 24-25 Februari 2025. Pertemuan fokus pada isu integrasi ekonomi ASEAN.</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Telah dilakukan koordinasi dan penyusunan diagnosa ekonomi terkait investasi melalui penyusunan IRU setiap bulan yang didistribusikan ke stakeholder terkait.</p> <p>Telah dilakukan koordinasi dan penyusunan laporan ketahanan fiskal terkait belanja negara yang juga dilaporkan kepada Menko Perekonomian dan disebarluaskan ke stakeholder terkait.</p>
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan rangkaian pertemuan dengan negara mitra dan juga K/L terkait untuk membahas finalisasi Lol PLTA Kayan serta persiapan Pertemuan The 3rd PPDT RI-Jepang.
2. Telah dilakukan rangkaian pertemuan dengan negara mitra dan juga K/L terkait untuk membahas finalisasi Protokol WGTII ke-6 RI-Rusia
3. Telah dilakukan rangkaian pertemuan untuk mengumpulkan masukan substansi pertemuan SKB RI-Rusia
4. Telah hadir pada rangkaian pertemuan persiapan ATIGA TNC.
5. Telah hadir pada rangkaian pertemuan Working Group AEC ke-11, ke-12, dan ke-13.
6. Telah hadir pada rapat rangkaian persiapan Pertemuan Tingkat Menteri ATIGA Upgrade.
7. Telah hadir pada persiapan rangkaian pertemuan AITIGA-JC ke-7 dan ke-8.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terselesaikannya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan MoU terkait Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8 dan Kemenko Perekonomian pada tanggal 12 Februari 2025
- b. Terselesaikannya kesepakatan kerja sama Indonesia-Vietnam melalui penandatanganan Lol between Indonesia-Vietnam on Capacity Building Cooperation in Field of Engineering and Digital Economy oleh Menko Perekonomian RI dan Menteri Perindustrian Vietnam pada tanggal 10 Maret 2025.
- c. Terselesaikannya kesepakatan kerja sama Indonesia-Jepang melalui penandatanganan Lol PLTA Kayan pada tanggal 28 Februari 2025.
- d. Terselesaikannya kesepakatan pada pertemuan forum Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2025 dan menghasilkan Joint Media Statement PPDT 1.5 Indonesia-Jepang.

- e. Terselesaikannya kesepakatan kerja sama ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGTII) RI-Rusia yang telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret 2025 dan menghasilkan Protocol WGTII ke-6 RI-Rusia.
- f. Terselesaikannya kesepakatan kerja sama pada Forum Board Meeting Prospera I Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 dan menghasilkan Minutes of Meeting.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting serta melakukan pertemuan di dalam kantor. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan forum lainnya.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni adanya keterbatasan anggaran, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada Triwulan I sehingga menyebabkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra harus diselenggarakan secara virtual dan hybrid, ataupun partisipasi aktif dalam sebuah forum harus dilaksanakan secara virtual.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. Fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis.

## **5**

### **Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ***Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi***

#### **Latar Belakang**

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

## Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Adapun target triwulan I sebesar 0 dari 4.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 0 dari 4 atau mencapai 0% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi,	Indeks	3 dari 4	0 dari 4	0 %

Koordinasi, dan  
Pengendalian di  
Bidang Kerja Sama  
Ekonomi dan  
Investasi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari rata-rata hasil survei seluruh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Pada triwulan I telah disusun form survei dan dilaksanakan koordinasi dengan seluruh Asisten Deputi untuk penyelenggaraan survei yang akan dilaksanakan pada triwulan II.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada triwulan II tahun 2025 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, tersusunnya form survei dan data responden.

**Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan koordinasi untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif pelaksanaan Survei Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Semester I secara efektif dan tepat waktu.	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh Eselon II dalam rangka penyelenggaraan survey.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah penyiapan dan reviu form survey yang akan disebarluaskan Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait serta pendataan responden.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terelesaisannya form survey melalui Google Form.
- b. Terelesaisannya data responden.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran diantaranya Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dilakukan secara online melalui Google Form dan penyampaian juga dilakukan melalui whatsapp sehingga tidak memerlukan penggunaan kertas maupun biaya lainnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni semakin sedikit responden yang berkenan melakukan pengisian survei dengan alasan sudah pernah mengisi sebelumnya. Sehingga, dirasa pengukuran indeks berdasarkan pengisian survei sebanyak 2 (dua) kali setahun cukup menantang untuk dilakukan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan lebih banyak pendataan responden.
2. Melakukan penyebaran link survey secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

## **6**

### **Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama**

#### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB



## **Ekonomi dan Investasi**

General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen perencanaan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Tahun 2025. Adapun target triwulan I sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, [Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi](#) yang telah terealisasi sebesar 21% atau mencapai 24,7% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	85%	21%	24,7%

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja serta penandatanganan pada tanggal 23 Mei 2025
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja dengan batas waktu tanggal 8 Agustus 2025
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah digunakan secara rutin selama triwulan I tahun 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja dengan meningkatkan monitoring ketercapaian target dari masing-masing komponen reformasi birokrasi dan realisasi anggaran di unit Eselon II.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Dialog Kinerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
- b. Terlaksananya persuratan dan disposisi Pimpinan melalui Srikandi.
- c. Terlaksananya pelaporan dan monitoring capaian kinerja dan anggaran melalui ekon-Go.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya seleksi kegiatan dan jumlah pegawai yang ditugaskan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan, beban kerja dan kebutuhan anggaran. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi penggunaan media digital dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat kebijakan refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan harus ditunda atau batal dilaksanakan.
2. Terdapat permasalahan teknis pada sistem Srikandi yang menyebabkan tidak dapat diakses dan digunakan untuk proses persuratan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan penyesuaian timeline kegiatan dan program kerja.
2. Menggunakan alternatif media digital melalui optimalisasi penggunaan Google Mail, Google Spreadsheet, dan Google Drive untuk administrasi perusratan dan disposisi.

Jakarta, 10 April 2025

Deputi Bidang Koordinasi Kerja  
Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi